

## PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PAD, DAU, DAN DBH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI JAWA TIMUR

Whiny Syafira Putri

Whinysyafira592@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to analyze and examine the effect of Flypaper Effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Profit-Sharing Fund on Regional Expenditure in districts/cities of East Java province. The population was districts/cities of East Java province. Moreover, there were 38 districts/cities as the sample. The data were secondary, in the form of a Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget. It was taken from [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) and collected during 2019-2022. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 26. The result concluded that Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Profit-Sharing Fund had a positive and significant effect on Regional Expenditure. It proved there had been a phenomenon of the Flypaper Effect within Local Government response on the Regional Expenditure in districts/cities of East Java province during 2019-2022.*

*Keywords: flypaper effect, local-owned source revenue, general allocation fund, profit sharing fund, regional expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji Pengaruh *Flypaper Effect* Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan sampel dari penelitian ini sebesar 38 Kabupaten/Kota. Periode pengamatan sampel selama yaitu pada tahun 2019-2022 dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang diperoleh dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Metode analisis pada penelitian menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS Versi 26. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa PAD, DAU dan DBH secara Bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal Ini membuktikan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* dalam respon pemerintah Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan 2022.

Kata Kunci: *flypaper effect*, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, belanja daerah

### PENDAHULUAN

Reformasi membawa perubahan terhadap pola kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia yang diharapkan negara. Diketahui bahwa otonomi daerah sebagai suatu tantangan baru yang harus dihadapi serta dilaksanakan oleh setiap pemerintah dalam pembuktian tingkat kemandiriannya. Daerah swadaya memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk menangani masalah masyarakat lokal dan mengatur masalah pemerintah. Agar setiap daerah dapat terdorong dan termotivasi untuk dapat melakukan perluasan dan pengembangan secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan pusat dan daerah yang dapat didefinisikan sebagai suatu

mekanisme pembagian keuangan yang adil, demokratis, proporsional, transparan dan efisien dalam upaya perwujudan pendanaan desentralisasi dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan.

Implementasi otonomi daerah dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya, untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas publik sehingga standar pelayanan publik dapat berkualitas semakin unggul, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan dan mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah tentunya mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional pemerintah daerah, dimana satu pihak sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Semakin pesat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka tentunya semakin besar juga kebutuhan dalam alokasi dana yang diperlukan semua keperluan penggunaan dana perimbangan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja (pengeluaran) daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pemerintah. Jumlah besarnya belanja daerah ditentukan oleh penerimaan pendapatan dari suatu daerah tersebut. Pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja daerah sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat dari setiap kota/ kabupaten yang ada di Indonesia. Fenomena nyata yang sering terjadi adalah Sebagian besar pemerintah daerah di provinsi Indonesia terutama pada bidang keuangan daerah adalah ditemukan relatif kecilnya kontribusi PAD di dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang seharusnya dapat digunakan sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan, peningkatan Kesehatan, peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lebih memiliki kredibilitas, sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai/belanja aparatur.

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer dari pemerintah pusat menjadi sumber dana utama pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan operasi sehari-hari, yang kemudian oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meningkatnya kebutuhan daerah membuat pemerintah daerah tidak dapat mendanai belanja daerah semata-mata dari pendapatan asli daerah, seperti yang dapat diketahui karena meningkatnya Tingkat kebutuhan daerah. Pendanaan untuk belanja daerah dapat berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

Masalah muncul Ketika pemerintah daerah berusaha memaksimalkan potensi sumber daya alam mereka namun gagal sehingga mengakibatkan fenomena *flypaper effect*, dan menjadi terlalu bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan Fenomena *Flypaper Effect* pemerintah daerah terus bereaksi berlebihan Ketika pemerintah pusat mentransfer dana kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan realisasi dari penerimaan daerah belum mampu memenuhi pembiayaan pada belanja daerah. Sehingga dengan adanya fenomena *flypaper effect* ini memberikan

kesempatan pada tiap daerah untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya untuk mengembangkan potensi sumber-sumber keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haris dan Nayang (2020: 1570) ditemukan bahwa terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah di Indonesia. Fenomena *flypaper effect* memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam menjalankan roda pemerintahan mereka sendiri. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zolla (2020) tidak ditemukan adanya fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hal ini disebabkan oleh respon belanja daerah masih lebih besar disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *flypaper effect* Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Agensi

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan persetujuan (kontrak) antara dua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima wewenang. *Principal* atau pihak pemberi wewenang memberikan hak dan kewenangan berupa tanggung jawab kepada pihak *agent* atau pihak penerima wewenang yang ikut andil dalam pengambilan keputusan atas nama pihak pemberi wewenang. Hubungan antara *agent* dan *principal* diibaratkan seperti hubungan antara pemilik modal yang mendelegasikan kekuasaannya dan modalnya kepada penerima kuasa dan modal yakni agen.

Ketika otonomi daerah dilaksanakan, pemerintah pusat memberikan pemerintah daerah kekuasaan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga mereka sendiri dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tentunya pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari bantuan pemerintah pusat hal ini karena pemerintah daerah membutuhkan bantuan yang mendukung terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah pusat setiap tahun menyediakan dana perimbangan bagi pemerintah masing-masing daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD untuk ditinjau dan ditandatangani, dibuat oleh pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai lembaga eksekutif. DPRD menerima pengajuan dengan maksud memverifikasi bahwa RAPBD yang disiapkan sudah sesuai dengan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan pemerataan potensi masing-masing daerah secara adil. Pemberlakuan otonomi daerah diberlakukan sebagai media untuk mendorong ruang publik untuk berpartisipasi dalam proses Pembangunan, meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan public, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan efektivitas dalam pengelolaan potensi sumber daya daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat menyalurkan bantuan kepada pemerintah daerah berupa transfer dana perimbangan. Pemerintah daerah menggunakan dana perimbangan untuk membiayai Pembangunan, dan hal itu menjadi bagian dari pendapatan daerah dalam anggaran daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengelola kebutuhan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah diharapkan untuk dapat terus meningkatkan pelayanan publik.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan daerah tentunya memerlukan susunan anggaran yang terstruktur. Anggaran tersebut digunakan sebagai media pembantu dalam

melaksanakan pelayanan publik dan Pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia dapat menggunakan anggaran daerah yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam sistem birokrasi. APBD memuat rencana pemerintah daerah selama satu tahun periode yang telah disusun dan ditetapkan oleh daerah.

Sehingga setelah berkonsultasi dengan DPRD, masyarakat mengetahui prioritas alokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. APBD memuat penjelasan menyeluruh tentang rencana kegiatan daerah; ketersediaan sumber pendapatan yang harus dipenuhi seminimal mungkin agar dapat menutupi biaya yang harus dipenuhi secara maksimal agar semua pengeluaran yang dikeluarkan; jenis proyek dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah dirinci dalam bentuk jumlah anggaran selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang no 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki setiap daerah tentunya berbeda-beda tergantung dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan bagaimana kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alamnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang wajib untuk dimaksimalkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar daerah tersebut dapat menjadi pemerintah daerah yang mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan menjadi daerah yang mandiri dalam memberikan pelayanan publik yang lebih unggul. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari pajak daerah yang terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota; Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu; Hasil Daerah yang Dipisahkan Pengelolaannya yang terdiri dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Milik Lembaga Keuangan, Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Swasta dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan Lain-lain PAD yang Sah seperti Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan Selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan apapun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran daerah yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dimana daerah tidak wajib menerima pembayaran dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah difungsikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota baik untuk urusan wajib maupun urusan pilihan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Belanja daerah dipisahkan atas jenis, organisasi dan fungsi, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Menurut Darise (2008:138) belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikategori berdasarkan menurut belanja yaitu belanja langsung dan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari perolehan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem desentralisasi untuk mengalokasikan kemampuan keuangan daerah secara merata Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk membagi secara adil dengan tetap memperhatikan dari potensi daerah seperti lokasi geografis, populasi, dan tingkat pendapatan.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan tetap mempertimbangkan ketimpangan antar daerah serta mempertimbangkan untuk kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Provinsi dan Kabupaten/kota. Keseluruhan jumlah Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi sebesar 10%, sedangkan untuk kabupaten/kota sebesar 90% yang dapat dihitung dari antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian dana alokasi umum bagi daerah yang ditemukan potensi fiskalnya besar namun untuk kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Namun sebaliknya, daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relative besar.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi hasil merupakan anggaran yang bersumber dari penerimaan APBN. Distribusinya di seluruh wilayah ditentukan oleh angka persentase dengan tujuan membiayai kebutuhan yang spesifik untuk wilayah tersebut sambil mencapai desentralisasi. Dana Bagi Hasil ditujukan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 Dana Bagi Hasil berasal dari pajak, cukai, dan sumber daya alam.

Pelaksanaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa dana tersebut dibagi berdasarkan atas daerah penghasil. Dimana prinsip tersebut digunakan dan berlaku dalam semua komponen Dana Bagi Hasil Pajak yang dapat digolongkan kedalam Dana Bagi Hasil adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Pasal 25 Pajak (Pph), Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 29 Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, pajak penerimaan dari hasil tembakau, dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berupa kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi yang tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Flypaper Effect***

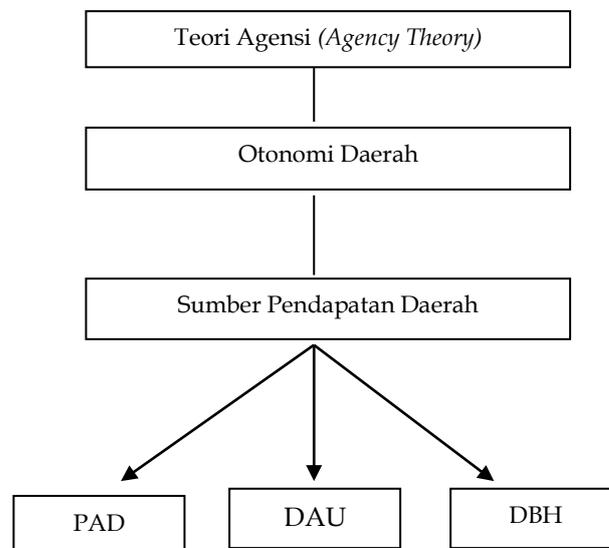
Pada tahun 1979 istilah *flypaper effect* pertama kali diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfield. *Flypaper Effect* adalah kondisi dimana pemerintah terlalu banyak merespon dalam membelanjakan dana hibah yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum dan di proksi oleh Pendapatan Asli Daerah daripada menggunakan kemampuan daerahnya sendiri. *Flypaper effect* muncul sebagai akibat adanya penyimpangan dalam teori bantuan tak bersyarat. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi stimulus pada pengeluaran daerah yang

disebabkan adanya perubahan di dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Tujuan pemerintah pusat menyediakan dana transfer adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah. Namun dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah menganggap pemberian dana transfer digunakan sebagai pemenuhan belanja daerah. Tujuan pemerintah pusat menyediakan dana transfer adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah.

Fenomena *flypaper effect* menggambarkan dampak yang lebih bahwa dana transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja daerah lebih besar daripada jumlah transfer yang diterima. Karena hal ini, kesenjangan pemerintah dapat terjadi dimana saja dan pemerintah daerah meningkatkan penggunaan dana transfer untuk mendapatkan keuntungan. Flypaper effect dapat terjadi karena 2 syarat yaitu: Ketika dalam hasil pengujian menunjukkan besarnya nilai koefisien Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil lebih tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah dan koefisien keduanya signifikan dan ketika dalam hasil pengujian menunjukkan Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan.

### Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah. Berdasarkan adanya otonomi daerah dan desentralisasi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pengeleloaan keuangan tersebut tentunya diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Dari penelitian Zachrias dan Lambelonova (2018), Nurdini *et al* (2015), Fadilah dan Helmayunita (2020) membuktikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, yang berarti semakin tinggi tingkat perolehan Pendapatan Asli daerah maka semakin tinggi juga Belanja Daerah yang dilakukan. Selain itu penelitian yang dilakukan Marjulas dan Sofyan (2020) membuktikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja

Daerah. Dapat diketahui bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber atas penerimaan daerah dengan persentase yang besar dan tentunya berasal dari daerahnya sendiri. Perolehan PAD akan digunakan sebagai media pembiayaan daerah oleh sebagian besar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Alokasi Umum dapat dikatakan sebagai dana yang memiliki peranan penting dalam mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi belanja daerah selain dana perimbangan lainnya. Besaran Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah. Dana Alokasi Umum dianggarkan dengan tujuan untuk dapat mendanai kegiatan dan kebutuhan khusus yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian Awalia *et al* (2023), Safitri *et al* (2023), Sihombing dan Wjiaya (2016), Astutik dan Antonius (2017), Wulandaria dan Mulyantob (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diperoleh dengan melalui perhitungan kontribusi daerah terhadap pemerintah pusat baik melalui hasil penerimaan pajak maupun dari hasil Sumber Daya Alam tersebut. Dana Bagi Hasil membantu pemerintah daerah dalam menyokong pendanaan Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil sengaja untuk dianggarkan dengan tujuan agar dapat mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) berperan dalam mendanai kegiatan pemenuhan belanja daerah. Penelitian oleh Fadillah dan Helmayunita (2020) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Indonesia. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurdini *et al* (2015) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, hal ini dikarenakan Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diperoleh melalui perhitungan kontribusi daerah terhadap pemerintah pusat baik melalui pajak maupun dari hasil Sumber Daya Alam. Dalam penelitian Wulandaria dan Mulyantob (2019) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H<sub>3</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

### ***Flypaper Effect***

Menurut Armawaddin *et al* (2017) *Flypaper Effect* terjadi Ketika dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan konteks desentralisasi fiskal dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah. *Flypaper Effect* adalah kondisi yang menunjukkan perilaku pemerintah lebih merespon transfer dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri Pendapatan Asli Daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah digunakan dalam membiayai Belanja Daerah. Penelitian oleh Astutik dan Antonius (2018) menunjukkan bahwa pada Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2014 dan ditemukan adanya fenomena *flypaper effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Wijaya (2016) juga menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* di provinsi Papua diperoleh bahwa DAU dan PAD berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya *Flypaper Effect* karena pengaruh nilai koefisien DAU lebih besar daripada nilai koefisien PAD. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zolla (2020) menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marjulas dan Sofyan (2020) menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun masih ditemukan adanya gejala *flypaper effect* karena pemerintah daerah Sumatera Barat diketahui masih melakukan respon yang berlebih terhadap DAU dari transfer dana perimbangan.

H<sub>4</sub>: Terjadi *Flypaper Effect* yang ditunjukkan melalui besarnya pengaruh DAU dan DBH terhadap Belanja Daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Metode dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2017: 23). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota. Adapun objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2022.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *full sampling* yaitu dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel karena terbatasnya jumlah populasi dalam penelitian ini yang dapat disebut juga sebagai sampel sensus. Menurut Sugiyono (2017: 137), sampel sensus adalah teknik pemantauan sampel bila semua populasi sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

### **Teknik Pengambilan Data**

#### **Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dokumenter berupa data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun data sekunder tersebut diperoleh melalui metode dokumentasi. Liando (2017: 43) menyatakan data sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengelompokan, pencatatan, perhitungan data-data yang berhubungan dengan data-data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Periode 2019-2022. Data Sekunder ini diperoleh melalui situs web [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu berupa belanja daerah. Sedangkan Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen atau terikat yang terdapat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Yang dimaksud dengan Belanja Daerah yaitu berupa angka realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Belanja daerah adalah semua pengeluaran atau kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### **Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah dalam membiayai kegiatan daerah yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan yang digunakan adalah PAD yang diterima daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 dengan satuan rupiah. Pada penelitian ini, pengukuran dalam Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada jumlah seluruh sumber penerimaan PAD.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan pemerintah pusat dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pengukuran Dana Alokasi Umum diperoleh dengan melihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2019-2022 dengan nominal mata uang rupiah.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan APBN dan cukup potensial yang dialokasikan kepada suatu daerah berdasarkan angka persentase guna mencukupi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil berasal dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komponen dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022 dalam satuan rupiah.

### ***Flypaper Effect***

*Flypaper Effect* adalah sebuah fenomena dimana pemerintah daerah merespon belanja daerah yang lebih banyak berasal dari transfer/grants daripada Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Asumsi penentuan terjadinya *Flypaper Effect* pada penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap Belanja Daerah. Syarat terjadinya *flypaper Effect* adalah (a) apabila efek (nilai koefisien) dana transfer DAU dan DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek (nilai koefisien) PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (b) PAD tidak signifikan. Ketika pengaruh DAU dan DBH lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah.

### **Teknik Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif**

Sugiyono (2017:232) menyatakan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ukuran statistik deskriptif yang

digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi masing-masing variabel.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, data terdistribusi secara normal atau tidak karena data yang baik adalah data yang telah terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui normal atau tidak, dilakukan dengan menggunakan non parametrik *Kolmogorov Smirnov* yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika hasil nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data tersebut telah terdistribusi secara normal. Sedangkan jika hasil probabilitasnya menunjukkan signifikansi  $< 0,05$  maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2021). Selain itu, dalam menguji normalitas residual dapat dilihat melalui analisis grafik dengan cara menganalisis grafik *Normal Probability (P-Plot of Regression, Standardized Residual)* yaitu dapat dilihat pada penyebaran data (titik) yang berada pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola telah terdistribusi secara normal. Ini berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas atau independen (Ghozali, 2021:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi jika *Tolerance*  $> 0,10$  atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $< 10$ .

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau memiliki varian yang berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2021:137) menyatakan bahwa cara untuk mendeteksinya dapat dilihat melalui pendekatan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (terikat) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika dalam grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan penyebaran data secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### **Uji Autokorelasi**

Ghozali (2021:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan meliputi: (a) angka D-W di bawah  $-2$  berarti terdapat autokorelasi positif; (b) angka D-W diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi; (c) angka D-W di atas  $+2$  berarti terdapat autokorelasi negatif.

#### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis dengan menggunakan regresi linier berganda digunakan sebagai pengujian untuk menunjukkan arah hubungan antara suatu variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas). Analisis regresi linier berganda juga bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan sehingga mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah. Data diolah dengan bantuan berupa aplikasi SPSS dan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + e$$

BD : Belanja Modal  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta$  : Slope atau koefisien regresi  
 PAD : Pendapatan Asli Daerah  
 DAU : Dana Alokasi Umum  
 DBH : Dana Bagi Hasil  
 e : *Standar eror*

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai  $R^2$  yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:97).

#### Uji Signifikansi F

Uji f ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Apabila hasil uji f menyatakan nilai signifikan sebesar  $< 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat diuji lebih lanjut yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya

#### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara individual dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ghozali (2021) menyatakan bahwa apabila nilai signifikan menyatakan  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikan menyatakan  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Hal tersebut digunakan dalam menguji hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keempat. Sedangkan untuk hipotesis kelima, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara yaitu a) apabila nilai koefisien DAU dan DBH terhadap belanja daerah  $>$  nilai koefisien PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau b) PAD tidak signifikan maka terjadi *flypaper effect*.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menunjukkan gambaran atau deskripsi suatu data yang diolah sehingga dapat mengetahui jumlah data yang diolah, nilai *minimum*, nilai *maximum*, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*) pada suatu variabel independen dan dependen. Analisis deskriptif yang

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DBH, serta variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Dalam penelitian ini, hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
PAD	142	131,84	5381,92	549,5621	788,927862	
DAU	142	367,58	1783,37	918,1561	297,62739	
DBH	142	80,48	3341,31	223,2157	429,53536	
BD	142	804,41	9448,24	2484,7864	1410,11496	
Valid N (listwise)	142					

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran. 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah observasi (N) dari penelitian ini sebanyak 142 observasi. Pada variabel PAD memiliki jumlah sampel sebanyak 142 data. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 131,84 Milyar dari Kota Pasuruan pada tahun 2021 dan nilai maximum dengan jumlah sebesar Rp 5.381,92 Milyar dihasilkan oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata atau *mean* diperoleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022 yaitu sebesar Rp 549,56251 Milyar dan untuk standar deviasinya (standar deviation) sebesar Rp 788,927862 Milyar. Pada Variabel DAU memiliki jumlah sampel sebanyak 142 data. Nilai minimum Dana Alokasi Umum sebesar Rp 367, 58 Milyar dari Kota Mojokerto pada tahun 2021 dan nilai maximum dengan jumlah sebesar Rp 1.783,37 Milyar dari Kabupaten Jember pada tahun 2019. Nilai rata-rata *mean* diperoleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022 yaitu sebesar Rp 918,1561 Milyar dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp 297,62739 Milyar. Pada Variabel DBH memiliki jumlah sampel sebanyak 142 data. Nilai minimum Dana Bagi Hasil sebesar Rp 80,48 Milyar dari Kota Batu pada tahun 2020 dan nilai maximum dengan jumlah sebesar Rp 3. 341,31 Milyar diperoleh Kabupaten Bojonegoro padatahun 2020. Nilai rata-rata atau mean diperoleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022. Nilai rata-rata atau mean diperoleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019 -2022 yaitu sebesar Rp 233,2157 Milyar dan untuk standar deviasinya (*standar deviation*) sebesar Rp 429,53536 Milyar. Dan pada variabel BD memiliki jumlah sampel sebanyak 142 data. Nilai minimum dengan jumlah sebesar Rp 804,41 Milyar diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2020 dan nilai maximum dengan jumlah Rp 9.448,24 Milyar diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2022. Nilai rata-rata atau mean diperoleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022 yaitu sebesar Rp 223,2157 Milyar dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp 1.410,11496 Milyar.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji apakah data telah terdistribusi normal atau tidak maka peneliti melakukan uji normalitas data dengan menggunakan 2 cara yaitu:

### Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*

Pengujian normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka data terdistribusi tidak normal begitupun sebaliknya. Berikut hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan pada Tabel 2 seperti dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

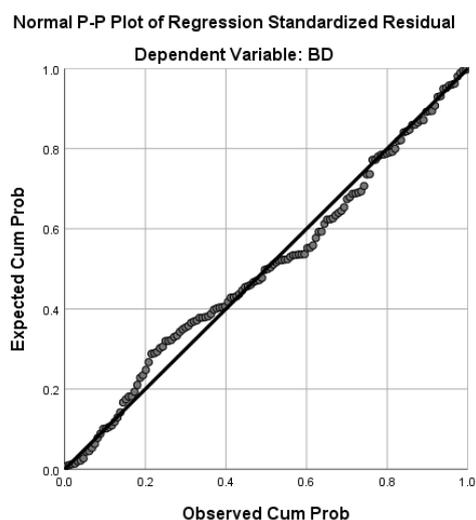
		Unstandardized Residual
N		142
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	165,49128054
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,063
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,069 <sup>c</sup>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 142 data besarnya nilai test statistik *Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0,072 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,069 yang berarti bahwa data penelitian telah terdistribusi dengan normal.

### Uji Normalitas dengan analisis Grafik

Uji normalitas dengan analisis grafik yang digunakan adalah grafik *normal probability plot*. Pada grafik ini, jika data menyebar pada garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. Gambar 2 berikut ini menyajikan hasil grafik P-Plot.



**Gambar 2**  
**Grafik Uji Normalitas**  
 Sumber: Laporan Realiasi Anggaran, 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil grafik normal Probability Plot yang disajikan pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Keterangan
		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	PAD	.869	1,151	Bebas Multikolinearitas
	DAU	.898	1,114	Bebas Multikolinearitas
	DBH	.965	1,036	Bebas Multikolinearitas

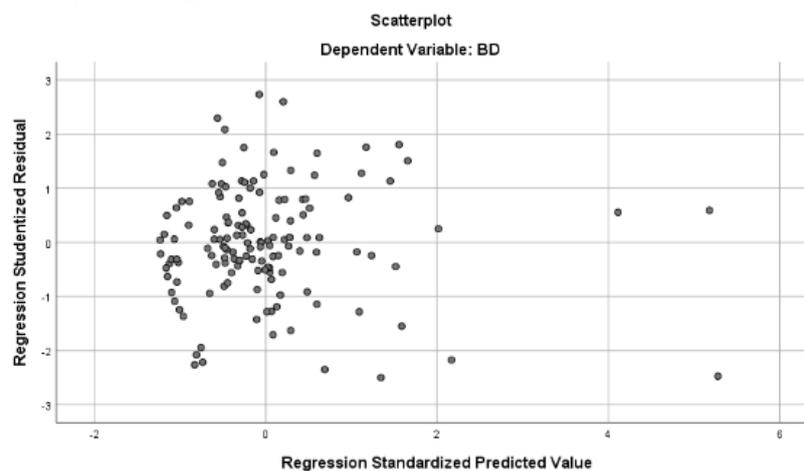
a. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Pada Tabel 3 diatas diperoleh hasil bahwa variabel independen PAD, DAU, dan DBH memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai kurang dari 10. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas atau independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varians atau memiliki varian yang berbeda dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel independen ZPRED dengan dengan residualnya SRESID. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dengan grafik *Scatterplot* sebagai berikut:



**Gambar 3**

Grafik Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat melalui grafik *Scatterplot* yaitu tidak membentuk pola yang teratur dan jelas serta titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi pada model regresi dapat dilihat pada uji Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992 <sup>a</sup>	,985	,984	167,28043	1,908

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu sebesar 1,879. Dengan asumsi ketentuan diatas, nilai D-W yang dihasilkan antara -2 sampai +2 maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini nilai D-W adalah  $-2 < 1,908 < 2$  sehingga pada model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menunjukkan arah dan mengukur kekuatan hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-109,848	46,504		-2,362	,020
	PAD	1,262	,021	,692	61,919	,000
	DAU	1,922	,050	,425	38,259	,000
	DBH	,782	,034	,250	23,307	,000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 5 diatas maka diperoleh model persamaan pada tabel 5 diatas maka diperoleh persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$BD = -109,848 + 1,262PAD + 1,922DAU + 0,782DBH$$

## Uji Kelayakan Model

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasinya maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dapat menjelaskan varian perubahan pada variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,992 <sup>a</sup>	,985	,984

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realiasi Anggaran, 2024 (diolah)

Pada Tabel 6 disajikan hasil uji koefisien determinasi atau R Square yaitu sebesar 0,985 atau sebesar 98,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DBH dapat menjelaskan dan memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen yaitu BD. Sedangkan 1,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

### Uji Signifikansi f

Uji f dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka model regresi layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji f penelitian ini disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Signifikansi f**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	248588540,833	3	82862846,944	2961,213	,000 <sup>b</sup>
	Residual	38616168,315	138	27982,741		
	Total	252450159,148	141			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 2,961,213 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa uji F telah signifikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model penelitian ini telah layak untuk digunakan.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara individual variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Hasil uji statistik t disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Statistik t**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model 1	(Constant)	-109,848	46,504		-2,342	,020
	PAD	1,262	,021	,692	61,231	,000
	DAU	1,922	,050	,425	38,259	,000
	DBH	,782	,034	,250	23,307	,000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 61,231 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis pertama diterima.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 38,259 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 23,785 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar 0,05. Artinya variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik uji t pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien yaitu sebesar 1,262 lebih rendah dibanding nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 1,922 dan Dana Bagi Hasil sebesar 0,782. Hal ini membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022 baik yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Dengan demikian, maka hipotesis empat dapat dinyatakan diterima.

## Pembahasan

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,262 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi maka akan diikuti oleh meningkatnya Belanja Daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penunjang utama dalam merealisasikan perkembangan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang disertai dengan kenaikan Belanja Daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Dimana perolehan pendapatan pajak dan retribusi daerah tersebut dikembalikan kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, peningkatan infrastruktur dan Pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dari penelitian Zachrias dan Lambelonova (2018), Nurdini *et al* (2015), Fadilah dan Helmayunita (2020) membuktikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, yang berarti

semakin tinggi tingkat perolehan Pendapatan Asli daerah maka semakin tinggi juga Belanja Daerah yang dilakukan terhadap Belanja Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,922 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum akan dapat meningkatkan Belanja Daerah dikarenakan DAU merupakan dana yang berasal dari APBN. Dana tersebut dialokasikan kepada daerah dengan bentuk transfer tak bersyarat yang dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam penggunaannya karena tidak ada kriteria tertentu. Pemerintah memiliki tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasil dari penelitian Awalia *et al* (2023), Safitri *et al* (2023), Sihombing dan Wijaya (2016), Astutik dan Antonius (2017), Wulandaria dan Mulyantob (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Umum diberikan agar tidak terjadi ketimpangan fiskal dalam rangka menjalankan urusan pemerintah daerah guna memberikan pelayanan publik. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maka Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,782 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Ketika Dana Bagi Hasil meningkat maka Belanja Daerah akan meningkat pula. Hal ini dikarenakan, Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial dan dapat dijadikan sebagai media tambahan modal dalam memenuhi belanja daerah yang digunkan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan public dan meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah dan Helmayunita (2020), Nurdini *et al* (2015), dan Wulandaria dan Mulyantob (2019) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Tingginya perolehan Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa kontribusi daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam juga mengalami peningkatan. Ketika Dana Bagi Hasil meningkat tentunya akan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan belanja yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan daerahnya.

### **Flypaper Effect Terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan maka dapat diketahui telah terjadi *flypaper effect* pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2022 yang dibuktikan dengan hasil efek nilai koefisien DAU dan DBH lebih besar daripada nilai PAD dan keduanya sama-sama signifikan. Hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 1,916, dan Dana Bagi Hasil sebesar 0,789 sehingga kedua variabel tersebut memiliki nilai koefisien lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah yang hanya sebesar 1,263. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana

perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) akan meningkatkan jumlah Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan *flypaper effect*, yakni tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang terus meningkat pada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah merespon belanja lebih besar dari dana pemerintah pusat yang berupa Dana Bagi Hasil daripada menggali sumber pendapatan Asli Daerah. Sehingga pemerintah cenderung untuk mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat daripada harus berusaha menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang dimiliki oleh daerah masing-masing. *flypaper effect* menjadi hambatan karena pemerintah daerah masih sangat bergantung atas dana yang diberi pemerintah pusat. Ternyata pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengelola keuangan, sedangkan dengan adanya otonomi daerah memiliki tujuan agar pemerintah daerah dapat menciptakan daerah yang mandiri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan mempengaruhi peningkatan Belanja Daerah tersebut dan sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan maka akan menurunkan Belanja Daerah. Dengan melihat PAD maka dapat diketahui tingkat kemandirian suatu daerah dimana semakin tinggi PAD maka semakin memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diperoleh, maka semakin tinggi pula Belanja Daerah yang dikeluarkan dan sebaliknya. Besarnya jumlah DAU yang diberikan dapat menggambarkan bahwa suatu daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini menunjukkan, jika DBH meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi DBH yang diperoleh daerah dapat mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga baik. 5) Hasil pengujian memperlihatkan terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien DAU dan DBH lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien PAD. Sehingga dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk DAU dan DBH masih mendominasi kebijakan belanja daerah daripada PAD yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan ditemukannya *flypaper effect*.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1) Bagi pemerintah, mengantisipasi untuk memanfaatkan potensi ekonomi local yang lebih besar dan memperluas sumber pendapatan untuk sektor pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah. Hal ini juga dapat memperhitungkan kemungkinan daerah menghasilkan uang daerah tambahan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga dapat mencapai kesejahteraan penduduk, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan mendukung pengeluaran daerah dari Pendapatan Asli Daerah, serta untuk memastikan menerima kemandirian daerah yang harus dicapai. 2) Peneliti berikutnya diharapkan untuk menggunakan penelitian dengan pendekatan lain dan mengkaji lebih dalam dengan kuisisioner dan wawancara sehingga dapat menggambarkan

perilaku aparatur dan menjelaskan terjadinya *flypaper effect*. 3) Bagi Masyarakat, agar mendapat dana yang akan mendongrak Pendapatan Asli Daerah, mengurangi ketergantungan daerah, dan mendukung Pembangunan daerah, instansi dan wajib pajak lainnya diharapkan dapat sadar diri dengan membayar pajak tepat waktu tanpa melebihi jatuh tempo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., dan Alfiat, M. N. 2017. Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 5.
- Astutik, E. N. P., dan Kuntara, A. D. 2017. Flypaper Effect and Factors Affecting Regional Government's Expenditure at Districts of Yogyakarta Special Region Province 2008-2014. *Asian Academic Accounting Association*.
- Awalia, N. P., Arifin, A., Alfarisy, M. F., dan Yaramai, J. Y. 2023. Flypaper Effect Analysis of General Allocation Fund and Local Own Source Revenue on Expenditures in Kuningan Regency 2006-2020. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(1).
- Fadilah, H., dan Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144-3159.
- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Edisi Kesepuluh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Liando, I. E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Marjulas, S., dan Syofyan, E. 2020. Analysis of Flypaper Effect and Fiscal Performance in Regional/Regency Spending in West Sumatera. In *The Fifth Padang Internasional Conference on Economics Education, Economics, Bussiness and Management, Accounting, and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020)* (pp. 78-91), Atlantis Press.
- Nurdini, R., Wiratno, A., dan Farida, Y. N. 2015. Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (DAK) Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Array. JAKA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan): Research, Invent, Solve and Share*, 2(1), 80-94.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006. *Dana Perimbangan 2005*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Permana, D. Y. dan S. N. Rahardjo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4): 1-10.
- Putri, Z. M. 2020. *Flypper Effect* Pada Pendapartan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Safitri, R. H., Nurullah, A., Kosim, A., dan Oktavianti, Z. 2023. Regional Expenditure: Analysis of Flypaper Effect in South Sumatera Province. *Issues in Business Management and Economics*, 11(2), 24.
- Sihombing, E. E., dan Wijaya, A. H. C. 2016. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 29-37.

- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Wulandaria, B. S., dan Mulyantob, G. R. 2019. Flypaper Effect Own Resource Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Revenue Sharing Funds (DBH) Towards Local Expenditure in Solo Raya for the 2012-2016 Periods. *International Journal of Economics, Business and Management Research* 3(3):221-233.
- Zachrias, E. N., dan Lambenolova, R. (2018). Flypaper Effect Local Income and Block Grant To Local Expenditure And Income In Kupang City East-South East Nusa Province. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, 10(2), 54-67.